

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI
INDUSTRI WILAYAH I
TAHUN 2015**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950**

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya Direktorat Pengembangan Fasilitas industri Wilayah I dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

Dasar hukum penyusunan LAKIP diantaranya adalah Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian No 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Direktorat Pengembangan Fasilitas industri Wilayah I atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Dengan dukungan alokasi anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 telah dilaksanakan berbagai program pembangunan guna merealisasikan target-target pengembangan perwilayahan di Sumatra dan Kalimantan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengembangan Fasilitas industri Wilayah I.

Melalui LAKIP ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Direktorat Pengembangan Fasilitas industri Wilayah I tahun 2015, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Pengembangan Fasilitas
Industri Wilayah I

Busharmaidi

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I Tahun 2015 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) menetapkan sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Kunci bagi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I pada tahun tertentu. Sasaran tersebut mempunyai target masing-masing, dimana pelaksanaannya didukung oleh anggaran yang tersedia di dalam DIPA.

Total jumlah DIPA yang diterima oleh Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I untuk tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 366.818.000.000,-. Dari total dana tersebut telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 345.542.556.000 (94.2%).

Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan, rata-rata nilai capaian kinerja adalah sebesar **120 %**. Nilai capaian tersebut telah menunjukkan bahwa program kerja Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan capaian IKU yang ditargetkan.

Untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung sasaran yang telah ditetapkan dan pelayanan bagi *stakeholder* terkait, perlu kiranya dilakukan perbaikan terutama melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I. Dengan adanya Permenperin No 107 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka tahun ini merupakan tahun terakhir bagi nomenklatur Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I. Mulai Januari 2016, direktorat ini akan berganti menjadi Direktorat Pengembangan Wilayah Industri II. Diharapkan proses reorganisasi dapat dilakukan sesingkat mungkin, dan menghasilkan pegawai yang lebih mumpuni dengan kemampuan untuk bekerja keras lebih baik.

Dari sisi keuangan diharapkan pula adanya pembenahan dalam upaya pencairan dana yang selama ini mengalami berbagai hambatan serta bagi penanggung jawab kegiatan lebih meningkatkan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Latar Belakang Kegiatan/Program	2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I	5
1. Visi dan Misi.....	5
2. Tujuan dan Sasaran.....	6
3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PFI Wilayah I.....	7
B. Rencana Kinerja	12
1. Sasaran.....	12
2. Indikator Kinerja Utama	12
C. Rencana Anggaran	12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja	16
1. Perspektif Stakeholder.....	16
2. Perspektif Tupoksi	35
3. Perspektif Kelembagaan.....	55
B. Akuntabilitas Keuangan	53

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 55
B. Saran 56

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Dit. PFI Wilayah I Tahun 2015	9
Tabel 2. Program Kegiatan Berdasarkan Perspektif Tupoksi	12
Tabel 3. Capaian IKU I dari Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui koordinasi dengan para <i>stakeholder</i> (pem. pusat, provinsi, kab/kota, dunia usaha).....	17
Tabel 4. Capaian IKU II dari Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui koordinasi dengan para <i>stakeholder</i> (pem. pusat, provinsi, kab/kota, dunia usaha).....	18
Tabel 5. Pangsa Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Total PDRB Regional di Wilayah I (Atas Dasar Harga Berlaku).....	19
Tabel 6. Perkembangan Nilai LQ Sektor Industri Manufaktur di Provinsi Wilayah I	20
Tabel 7. Capaian IKU III dari Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui koordinasi dengan para <i>stakeholder</i> (pem. pusat, provinsi, kab/kota, dunia usaha).....	21
Tabel 8. Capaian IKU IV dari Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui koordinasi dengan para <i>stakeholder</i> (pem. pusat, provinsi, kab/kota, dunia usaha).....	22
Tabel 9. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur di Sumatra dan Kalimantan	23
Tabel 10. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur di Wilayah I	23
Tabel 11. Pengelompokan Sektor Industri Manufaktur Menurut Provinsi di Wilayah I Berdasarkan Nilai Pertumbuhan dan LQ	24
Tabel 12. Capaian IKU V dari Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui koordinasi dengan para <i>stakeholder</i> (pem. pusat, provinsi, kab/kota, dunia usaha).....	25
Tabel 13. Capaian IKU VI dari Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui koordinasi dengan para <i>stakeholder</i> (pem. pusat, provinsi, kab/kota, dunia usaha).....	26
Tabel 14. Kontribusi Sektor Industri Manufaktur di Sumatra dan Kalimantan ..	27
Tabel 15. Kontribusi Sektor Industri Manufaktur di Wilayah I	27
Tabel 16. Capaian IKU VII dari Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui koordinasi dengan para <i>stakeholder</i> (pem. pusat, provinsi, kab/kota, dunia usaha).....	27

Tabel 17. Perkembangan Investasi PMDN Menurut Sektor	28
Tabel 18. Investasi PMDN Tahun 2015 Menurut Provinsi di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	29
Tabel 19. Investasi PMDN Tahun 2015 terhadap nasional di Wilayah I	30
Tabel 20. Perkembangan Investasi PMA Menurut Sektor	31
Tabel 21. Investasi PMA Tahun 2015 Menurut Provinsi di Wilayah I	32
Tabel 22. Investasi PMA Tahun 2015 di Wilayah I	32
Tabel 23. Capaian IKU VII dari Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui koordinasi dengan para stakeholder (pem. pusat, provinsi, kab/kota, dunia usaha).....	33
Tabel 24. Perbandingan Ekspor Non-Migas Tahun 2012 dan 2014 Jawa dan Sumatra-Kalimantan	34
Tabel 25. Perbandingan Ekspor Non-Migas Tahun 2012 dan 2014 Menurut Provinsi di Wilayah I	34
Tabel 26. Capaian IKU dari Meningkatnya Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi yang Diimplementasikan.....	35
Tabel 27. Capaian IKU dari Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui koordinasi dengan para stakeholder (pem pusat, provinsi, kab/kota, dunia usaha).....	51
Tabel 29. Capaian IKU dari Berkembangnya pusat - pusat pertumbuhan industri di daerah	53
Tabel 30. Capaian IKU dari Peningkatan Budaya Pengawasan Pada Unsur Pimpinan dan Staf.....	54
Tabel 31. Capaian IKU dari Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan.....	55
Tabel 32. Capaian IKU dari Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang profesional	56
Tabel 33. Realisasi Anggaran Direktorat PFI Wilayah I Tahun 2015.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I	2
Gambar 2. Peta Strategi Direktorat PFI Wil. I	6
Gambar 3. Nilai Rata-Rata LQ Tahun 2010-2013 Sektor Industri Manufaktur di Provinsi Wilayah I	20
Gambar 4. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur Tahun 2001-2014 ..	23
Gambar 5. Pertumbuhan Rata-Rata Sektor Industri Manufaktur Tahun 2010-2013 Menurut Provinsi	24
Gambar 6. Perkembangan Investasi PMDN Tahun 2010-2014 Menurut Wilayah	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

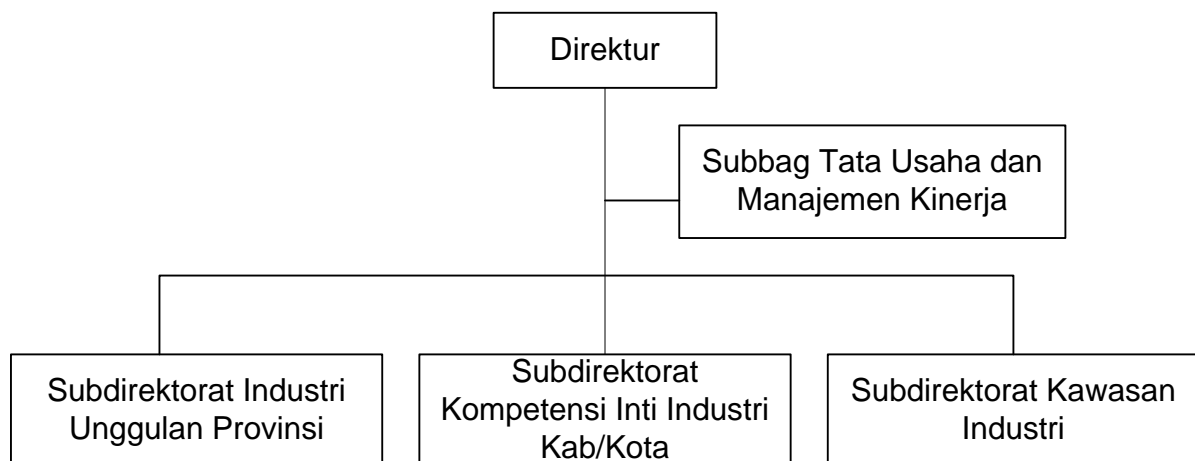
Semenjak dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan fasilitas industri wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan Perwilayahan Industri meliputi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) di wilayah Sumatra dan Kalimantan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan fasilitas industri wilayah Sumatra dan Kalimantan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan fasilitas industri wilayah Sumatra dan Kalimantan;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi teknis pengembangan fasilitas industri wilayah Sumatra dan Kalimantan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

B. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti pada bagian A diatas, unit organisasi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I dibagi menjadi 3 (tiga) unit Eselon III, dengan struktur seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I

C. Latar Belakang Kegiatan/Program

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, mengembangkan industri kecil dan menengah, mewujudkan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Jawa, khususnya, dalam konteks tupoksi Wilayah I, ke Sumatra dan Kalimantan.

Salah satu misi pembangunan jangka panjang yang terkait dengan pengembangan wilayah adalah mewujudkan pemerataan dan penyebaran pembangunan industri berlandaskan pada keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, diharapkan juga dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, keunggulan komparatif tadi menjadi keunggulan kompetitif. Tentu saja ini memerlukan intervensi dari Pemerintah. Pengembangan wilayah tersebut diarahkan untuk memantapkan penataan pengembangan kewilayahan industri dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mencakup pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, penguatan daya saing daerah dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Hal tersebut diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. UU tersebut secara eksplisit mengamanatkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokuh ketahanan nasional.

Arah pembangunan industri kewilayahan, berdasarkan pada amanah UU tersebut, pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan nilai tambah industri di daerah. Dengan berkembangnya sektor industri di daerah maka hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan daerah. Beberapa efek langsung akibat pertumbuhan industri adalah: penyerapan tenaga kerja secara masif, peningkatan investasi dan kredit yang akan menggerakkan sektor ril, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat lokal. Konsep dasar pengembangan industri kewilayahan harus dikaitkan dengan aspek utamanya, yaitu: rencana tata ruang wilayah dan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional, dan, sekali lagi, peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah.

Wilayah Sumatra dan Kalimantan relatif lebih maju dan berkembang dibanding Kawasan Timur Indonesia. Sumatra dan Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang jauh lebih besar daripada Jawa. Seiring dengan perubahan isu lingkungan dan kelangkaan sumber daya dukung energi seperti air dan energi listrik, Jawa sudah berada pada ambang jenuh bagi sektor industri. Jawa difokuskan pada industri teknologi tinggi dan industri jasa, serta industri kecil dan menengah yang tidak bisa jauh dari pasarnya. Sedangkan untuk industri di luar kriteria di atas, akan di dorong keluar Jawa, baik itu ke Kawasan Timur Indonesia, maupun ke wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Pada dasarnya pembangunan sektor industri memiliki dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan bersifat *top-down*, yakni pengembangan industri yang rencana induknya / cetak birunya di rancang oleh Pemerintah Pusat. Contohnya adalah: pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pembangunan kawasan industri prioritas, dan pengembangan klaster industri. Kedua, pendekatan yang bersifat *bottom-up*, dimana pembangunan industri merupakan inisiatif dari daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam konteks pembangunan industri yang dilakukan di daerah dan agar terjadi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan industri Nasional, maka Pemerintah Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada dasarnya implementasi sektor industri di daerah diserahkan kepada peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta, sementara pemerintah pusat lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang mendorong dan memberikan berbagai kemudahan bagi aktivitas-aktivitas sektor swasta. Pemerintah Pusat lebih banyak berperan pada penyusunan kebijakan aturan main.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis) dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I sebagai unit pada Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai rujukan untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan perwilayahan industri di Sumatra dan Kalimantan. Dengan adanya perencanaan terpadu dan adanya keselarasan implementasi program-program, yang diiringi oleh proses evaluasi dan pengendalian pada kurun waktu 2015-2019, diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I, selain itu ini juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian sasaran dan kinerja.

A. Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Direktorat pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I adalah: “Terwujudnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam Yang Berdaya Saing Tinggi di Sumatra dan Kalimantan Yang Mampu Berkompetisi Secara Global”.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I mengemban misi sebagai berikut:

- Peningkatan daya saing industri Sumatra dan Kalimantan melalui fasilitasi, regulasi, dan implementasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan

Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;

- Memfasilitasi pembangunan industri daerah berlandaskan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana industri guna mendukung perwilayahan industri;

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan pengembangan perwilayahan industri Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I adalah:

- a. Terwujudnya percepatan pembangunan industri dengan berkembangnya WPPI, KPI dan KI yang dimotori oleh :
 - 1) Tumbuhnya industri baru berskala besar yang mengolah potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, di Sumatra dan Kalimantan untuk memaksimalkan nilai tambah di dalam negeri.
 - 2) Tumbuhnya industri baru yang sangat strategis yang dapat memperkuat struktur industri.
- b. Terwujudnya percepatan pemerataan pembangunan industri melalui penumbuhan Sentra IKM berbasis potensi sumber daya daerah yang memiliki keterhubungan kuat dengan industri besar di Sumatra dan Kalimantan.
- c. Meningkatnya kualitas industri dan infrastruktur pendukung industri di Sumatra dan Kalimantan

b. Sasaran

Berlandaskan visi dan misi, maka dapat ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1) Fasilitas koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan nasional, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kinerja industri di Sumatra dan Kalimantan;

- 2) Fasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatra dan Kalimantan;
- 3) Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Sumatra dan Kalimantan;
- 4) Tumbuh dan berkembangnya sentra industri kecil dan industri menengah di Sumatra dan Kalimantan;
- 5) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri di Sumatra dan Kalimantan;
- 6) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 7) Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran;
- 8) Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 9) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

Arah kebijakan Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I adalah berupaya semaksimal mungkin untuk menarik investasi industri dengan menyediakan lokus bagi industri tersebut dimana seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Setelah itu baru fokus pada kebijakan yang mendorong pertumbuhan populasi industri dan peningkatan produktivitasnya. Uraian rinci tentang arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Perwilayahan Industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan :
 - (a) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus atau Wilayah Pertumbuhan Strategis;
 - (b) Perencanaan Kawasan Peruntukan Industri;
 - (c) Pembangunan Kawasan Industri; dan
 - (d) Pembangunan Sentra IKM.Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah:
 - a. Memfasilitasi perencanaan dan pembangunan kawasan industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan;

- b. Memfasilitasi perencanaan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) di Wilayah Sumatra dan Kalimantan;
 - c. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam upaya membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolahan limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.
2. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja).

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka Direktorat PFI Wilayah I telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis I:

Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kinerja industri di Sumatra dan Kalimantan.

Bentuk koordinasi dan sinkronisasi dituangkan dalam penataan rencana tata ruang wilayah dan rencana induk pembangunan industri yang terintegrasi. Indikator yang digunakan adalah

- 1) Penataan kawasan industri dan kegiatan industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
- 2) Tesusunnya rencana induk pembangunan industri Daerah (REPIDA) Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Sasaran Strategis II:

Fasilitasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatra dan Kalimantan.

Fasilitasi WPPI ditargetkan pada pengembangan 10 (sepuluh) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di 10 (sepuluh) Provinsi, yakni: Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, dan Lampung.

Tabel 1. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai WPPI di Sumatra dan Kalimantan

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi
----	-----------------------	----------

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang –Sambas-Bengkayang (sebagian KAPET Khatulistiwa)	Kalimantan Barat
2	Tanah Bumbu-Kotabaru (termasuk KAPET BATULICIN)	Kalimantan Selatan
3	Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara - Bontang-Kutai Timur (termasuk KAPET SASAMBA)	Kalimantan Timur
4	Tarakan-Nunukan	Kalimantan Utara
5	Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie -Bireun-Lhokseumawe (termasuk KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM)	Aceh
6	Medan-Binjai-Deli Serdang-Serdang Bedagai - Karo-Simalungun-Batubara	Sumatra Utara
7	Dumai-Bengkalis-Siak	Riau
8	Batam-Bintan	Kepulauan Riau
9	Banyuasin -Muara Enim	Sumatra Selatan
10	Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan	Lampung

Pusat-pusat pertumbuhan industri atau disebut dengan WPPI merupakan wilayah yang menjadi polar bagi kegiatan industri. Pertumbuhan ini diindikasikan melalui:

- 1) Laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan non-migas di WPPI pada koridor Sumatra dan Kalimantan;
- 2) Kontribusi PDRB industri pengolahan non-migas terhadap PDRB di WPPI.

Sasaran Strategis III:

Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan. PP No 24 Tahun 2009 mewajibkan kegiatan industri berada di dalam kawasan industri atau minimal berada di Kawasan Peruntukan Industri (apabila belum ada kawasan industri atau kawasan industri eksisting sudah terisi penuh) telah memberikan dorongan kuat agar proses kegiatan industri berjalan efisien. Di sisi lain, hal ini membuka sejumlah peluang dan tantangan tentang penyiapan lokus industri yang baik. Proses penyiapan lokus industri itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan yang mesti dilakukan agar mendapatkan lokus industri yang optimal. Tahapan tersebut adalah perlu adanya studi kelayakan, penetapan KPI untuk KI dalam RTRW, penyusunan masterplan, perancangan *detail engineering design* KI,

penyusunan AMDAL, penyusunan RDTR sekitar kawasan industri, dan promosi investasi kawasan industri. Sebagian besar proses tersebut menuntut peran aktif bahkan intervensi dari Pemerintah. Dalam periode tahun 2015-2019, sesuai dengan program Nawacita Presiden Jokowi, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) diberikan tanggungjawab untuk membangun 14 (empat belas) kawasan industri yang 7 (tujuh) diantaranya berada di wilayah Sumatra dan Kalimantan yang merupakan domain Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I. Di luar ke 7 (tujuh) kawasan industri prioritas, Direktorat PFI Wilayah I juga memfasilitasi *softcore* pengembangan kawasan industri lainnya. Dalam pembangunan kawasan industri di Sumatra dan Kalimantan. Indikator yang digunakan dalam pencapaian hasil sasaran ini adalah:

- 1) Bertambahnya jumlah dan luas kawasan industri di Sumatra dan Kalimantan
- 2) Bertambahnya investasi di dalam kawasan industri
- 3) Keteraturan dalam lokasi dan lingkungan kawasan industri dan kegiatan industri.

Sasaran Strategis IV:

Tumbuh dan berkembangnya sentra industri kecil dan menengah di Wilayah Sumatra dan Kalimantan. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang. Tujuan pendirian SIKIM adalah untuk mendorong daya saing IKM melalui pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas dalam suatu lokasi yang terintegrasi. Tumbuh dan berkembangnya SIKIM di daerah diharapkan dapat mendorong penyebaran dan pemerataan pembangunan industri. Indikator keberhasilan berupa:

- 1) Meningkatkan jumlah SIKIM yang terbangun dan beroperasi;
- 2) Meningkatnya jumlah IKM yang masuk ke dalam SIKIM.

Sasaran Strategis V:

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Pembangunan infrastruktur industri dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif. Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar Kawasan Peruntukan Industri, meliputi energi dan lahan kawasan industri. Penyediaan infrastruktur industri dilakukan melalui koordinasi antar kementerian/lembaga, pembangunan dan pengembangan infrastruktur industri, serta fasilitasi penyediaan infrastruktur industri. Sasaran ini diindikasikan melalui:

- 1) Jumlah kawasan industri yang dibangun dan beroperasi;
- 2) Jumlah sentra IKM yang dibangun dan beroperasi

Sasaran Strategis VI:

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sasaran ini diindikasikan melalui tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja

Sasaran Strategis VII:

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran. Dari sasaran ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan. Indikator kinerja adalah tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan.

Sasaran Strategis VIII:

Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan Undang-Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam

rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Indikator kinerja adalah:

- 1) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan;
- 2) Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dan Ditjen Pengembangan Perwilyayahan Industri

Sasaran Strategis IX:

Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan. Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Ini artinya bahwa laporan keuangan yang di susun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah tingkat kualitas laporan keuangan.

B. Rencana Kinerja

1. Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I, maka telah ditetapkan sasaran program/kegiatan pengembangan Wilayah I yang mencakup Wilayah Sumatera dan Kalimantan yaitu:

- a. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- b. Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- c. Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- d. Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) yang di dukung oleh Industri Besar di Wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- e. Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera dan Kalimantan;

- f. Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah Sumatra dan Kalimantan.

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur capaian sasaran program/kegiatan sesuai dengan rencana strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Kegiatan Dit. PFI Wilayah I Tahun 2015

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Sumatra	Persentase	17.35%
		Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Kalimantan	Persentase	7.65%
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Sumatra	Persentase	8.05%
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Kalimantan	Persentase	7.20%
		Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Sumatra terhadap nilai tambah sektor industri nasional	Persentase	21.10%
		Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri di Wilayah Kalimantan terhadap nilai tambah sektor industri nasional	Persentase	3.29%
		Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Sumatra	Persentase	17.35%
		Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Kalimantan	Persentase	4.34%
		Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Sumatra terhadap total populasi industri besar sedang nasional	Persentase	10.27%
		Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Kalimantan terhadap total populasi industri besar sedang nasional	Persentase	2.26%

2	Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatra dan Kalimantan	Tersusunnya masterplan pengembangan WPPI	dokumen	4
3	Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan	KI	5 KI
		Beroperasinya Pusat Inovasi Kelapa Sawit di Kawasan Industri Sei Mangkei Sumatra Utara	KI	1 KI
4	Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana Pembangunan	SIKIM	2 SIKIM
5	Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Terfasilitasinya kajian penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota	daerah	12 daerah
6	Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah Sumatra dan	Terfasilitasinya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik	daerah	8 daerah

	Kalimantan			
7	Forum kegiatan/koordinasi/monev/ pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah Wilayah I	Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah I (Sinergi, Koordinasi, dan Pertemuan Teknis RKAKL)	dokumen	4 dokumen
		Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah I	dokumen	1 dokumen
		Layanan Manajemen Kinerja	Bulan	12 bulan

C. Rencana Anggaran

Untuk mewujudkan rencana kinerja Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I tahun 2015 dialokasikan anggaran melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dengan Pagu yang awalnya sebesar Rp 25.408.000.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus delapan juta rupiah) yang meliputi program utama dan program penunjang. Namun setelah adanya kegiatan APBNP, nominal pagu melonjak menjadi sebesar Rp.366.818.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta rupiah.. Anggaran APBNP baru terealisasi sekitar bulan Mei.

Adapun alokasi anggaran masing-masing kegiatan yang tercakup dalam program kegiatan disajikan dalam tabel 2 dibawah ini:

Tabel 3. Program Kegiatan Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I Tahun 2015

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ANGGARAN (Rp.)
1	Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Penyusunan pola pengembangan WPPI di koridor Sumatra	1.461.420.000
		Penyusunan pola pengembangan WPPI di koridor Kalimantan	1.157.420.000
2	Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Fasilitas kawasan industri dalam penyusunan kajian masterplan, DED, dan RDTR di sekitar kawasan industri di Koridor Sumatra dan Kalimantan	2.290.358.000*)
		Fasilitas Penyediaan Sarana Prasarana Pusat Inovasi Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	1.979.248.000
		Fasilitas pembangunan fisik kawasan industri (Pembangunan Jalan Poros, <i>Dry Port</i> , Tangki Timbun, dan Jalan Kereta Api) di Sumatra dan Kalimantan	311.491.725.000*)
3	Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Penyusunan Pola Pengembangan SIKIM di koridor Sumatra dan Kalimantan	901.658.000
		Fasilitas Rencana Penyiapan Pembangunan SIKIM di koridor Sumatra dan Kalimantan	2.119.050.000
4	Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Fasilitas Kajian Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi di Koridor Sumatra dan Kalimantan	4.062.840.000
		Fasilitas Sosialisasi Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten di koridor Sumatra dan Kalimantan	

		Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten di Koridor Sumatra dan Kalimantan	
5	Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Fasilitasi Pengembangan Industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan Pasca Konflik di Wilayah Sumatra	2.224.453.000
		Fasilitasi Pengembangan Industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan Pasca Konflik di Wilayah Kalimantan	1.365.040.000
6	Forum kegiatan/koordinasi/ monev/pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah Wilayah I	Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah I (Sinergi, Koordinasi, dan Pertemuan Teknis RKAKL)	458.840.000
		Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah I	340.550.000
		Layanan Manajemen Kinerja	412.620.000
Jumlah			366.818.000.000

*) Anggaran APBNP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penilaian atas pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (Ditjen PPI) dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

- (1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *maximize* (indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan) :

$$\text{Indeks Capaian} = \text{realisasi} / \text{target} \times 100\%$$

- (2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *minimize* (indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan) :

$$\text{Indeks Capaian} = [(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}] / \text{target} \times 100\%$$

Direktorat PFI Wilayah I melakukan pengukuran Kinerja dengan 7 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja utama, yaitu:

1. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Sumatra dan Kalimantan

- a) **Indikator Kinerja:** Meningkatnya *share* sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Sumatra

Tabel 4. Capaian IKU I dari Meningkatnya *share* sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Sumatera

Sasaran program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatera dan Kalimantan	Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Sumatera	15%	18,97%	110%	17.35%	19,03%	109%
Nilai Capaian Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Sumatera							109%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 17.35%, sementara realisasinya adalah 19.03%. Perhitungan *share* industri manufaktur tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan *share* sektor industri terhadap PDRB sampai tahun 2014. Untuk data terkait PDRB, data yang digunakan tidak bisa *update* sampai dengan tahun 2015 karena ada *time lag* selama 1 (satu) tahun sehingga yang digunakan adalah data tahun 2014 dengan tahun dasar 2010. Angka ini digunakan sebagai proyeksi untuk kondisi tahun 2015. Hal yang sama juga dilakukan pada tahun 2014, dimana industri PDRB yang digunakan sebagai acuan adalah sampai tahun 2013. Dengan proyeksi tersebut diatas, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, pangsa nilai tambah sektor industri tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

- b) Indikator Kinerja Utama:** Meningkatnya *share* sektor industri pengolahan Wilayah Kalimantan terhadap PDRB

Tabel 5. Capaian IKU I dari Meningkatnya *share* sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Kalimantan

Sasaran program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Kalimantan	7%	16,61%	230%	7.65%	17,74%	230%
Nilai Capaian Meningkatnya <i>share</i> sektor industri terhadap total PDRB di Wilayah Kalimantan							230%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 7,65%, sementara realisasinya adalah 17,74%. Perhitungan *share* industri manufaktur tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan *share* sektor industri terhadap PDRB sampai tahun 2014. Untuk data terkait PDRB, data yang digunakan tidak bisa *update* sampai dengan tahun 2015 karena ada *time lag* selama 1 (satu) tahun sehingga yang digunakan adalah data tahun 2014 dengan tahun dasar 2010. Angka ini digunakan sebagai proyeksi untuk kondisi tahun 2015. Hal yang sama juga dilakukan pada tahun 2014, dimana industri PDRB yang digunakan sebagai acuan adalah sampai tahun 2013. Dengan proyeksi tersebut diatas, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, pangsa nilai tambah sektor industri tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

Tercapainya target *share* sektor industri di seluruh Wilayah Sumatra dan Kalimantan tidak diiringi dengan perkembangan *share* sektor industri di tingkat nasional. Di tingkat nasional, *share* sektor industri terhadap total PDB pada tahun 2015 mengalami penurunan yang relatif kecil menjadi 23,96 persen, dimana sebelumnya pada tahun 2014 mencapai 24,40 persen. Tidak optimalnya peningkatan *share* sektor industri manufaktur ini disebabkan beberapa faktor baik di sisi sektor industri sendiri maupun sektor-sektor ekonomi lainnya. Di sisi sektor industri, penurunan ini disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor industri baik karena faktor – faktor di tingkat global maupun di tingkat nasional. Di tingkat global disebabkan oleh menurunnya ekspor produk-produk hasil industri ke negara-negara tujuan ekspor utama seperti China, Amerika Serikat, Jepang dan Eropa sebagai akibat melemahnya perekonomian di negara-negara tersebut. Di tingkat nasional, penurunan *share* tersebut sebagai akibat tidak optimalnya kinerja sektor industri sehingga menurunkan penyertaan industri manufaktur karena faktor-faktor seperti ketersediaan gas yang sangat terbatas untuk sektor industri, keterbatasan pasokan energi listrik, masalah infrastruktur yang menyebabkan tingginya biaya logistik, iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif seperti perijinan, pertanahan, perpajakan dan faktor birokrasi.

Tabel 6. *Share* Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB di Wilayah I (Atas Dasar Harga Berlaku)

(Dalam Persen)

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
Sumatra	20.26	19.64	19.12	18.97	19.03	19.03
Kalimantan	20.62	17.45	16.13	16.61	17.74	17.74
Nasional	23.84	25.21	24.89	24.40	23.96	23.96

Sumber: BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015) Tahun 2015*) adalah nilai proyeksi

Untuk melihat bagaimana peranan sektor industri manufaktur di suatu provinsi secara relatif dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di tingkat nasional, dapat digunakan nilai LQ (Location Quotien). Nilai LQ yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur sudah menjadi sektor basis di suatu provinsi. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) provinsi dimana sektor industri manufaktur sudah menjadi sektor basis di provinsi-provinsi tersebut. Keenam provinsi

tersebut adalah: Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Lampung, dan Kalimantan Timur.

Tabel 7. Perkembangan Nilai LQ Sektor Industri Manufaktur di Provinsi Wilayah I
(Dalam Persen)

No.	Provinsi	LQ					Rata-Rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Aceh	0.57	0.50	0.48	0.43	0.39	0.474
2.	Sumatra Utara	4.45	4.26	4.22	4.14	4.14	4.242
3.	Sumatra Barat	0.78	0.74	0.74	0.72	0.70	0.736
4.	Riau	5.91	5.72	5.64	5.55	5.64	5.692
5.	Kep. Riau	2.66	2.58	2.74	2.83	2.81	2.724
6.	Jambi	0.65	0.62	0.64	0.65	0.65	0.642
7.	Sumatra Selatan	2.31	2.12	2.05	2.14	2.14	2.152
8.	Bangka Belitung	0.58	0.55	0.54	0.54	0.51	0.544
9.	Bengkulu	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.108
10.	Lampung	1.63	1.55	1.61	1.60	1.66	1.61
11.	Kalimantan Barat	0.93	0.90	0.87	0.86	0.87	0.886
12.	Kalimantan Tengah	0.55	0.51	0.50	0.50	0.58	0.528
13.	Kalimantan Selatan	0.74	0.69	0.69	0.67	0.69	0.696
14.	Kalimantan Timur	6.19	5.13	4.56	4.14	4.03	4.81
15.	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015)

c) **Indikator Kinerja Utama:** Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Sumatra terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

Tabel 8. Capaian IKU II dari Meningkatnya Unit Usaha Industri Besar Sedang di Wilayah Sumatra Terhadap Populasi Industri Besar Sedang Nasional

Sasaran program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatra dan	Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah	9%	9%	100%	10.27%	10,39%	101%

Kalimantan	Sumatra terhadap total populasi industri besar sedang nasional						
Nilai Capaian Meningkatnya Unit Usaha Industri Besar Sedang di Wilayah Sumatra Terhadap Populasi Industri Besar Sedang Nasional							101%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 10.27% persen, sementara realisasinya adalah 10,39% persen. Perhitungan peningkatan sektor industri manufaktur besar sedang di Sumatra tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2015 yang telah dirilis oleh BPS. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, pertumbuhan sektor industri manufaktur tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

- d) **Indikator Kinerja Utama** :meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Kalimantan terhadap total populasi industri besar sedang nasional

Tabel 9. Capaian IKU II dari Meningkatnya Unit Usaha Industri Besar Sedang di Wilayah Kalimantan Terhadap Populasi Industri Besar Sedang Nasional

Sasaran program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Meningkatnya unit usaha industri besar sedang di Wilayah Kalimantan terhadap total populasi	1%	1%	100%	2.26%	1,65%	73%

	industri besar sedang nasional						
Nilai Capaian Meningkatnya Unit Usaha Industri Besar Sedang di Wilayah Kalimantan Terhadap Populasi Industri Besar Sedang Nasional							73%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 2,26 persen, sementara realisasinya adalah 1,65 persen. Nilai capaian diperoleh di bawah target yakni 73%. Ini disebabkan di level nasional nilai unit usaha industri besar sedang tumbuh di Jawa yang lebih punya infrastruktur yakni 83,03%. Perhitungan peningkatan sektor industri manufaktur besar dan sedang di Kalimantan tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan basis data perkembangan ekonomi nasional sampai dengan Triwulan III tahun 2015 yang telah dirilis oleh BPS. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015, pertumbuhan sektor industri manufaktur tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

Tabel 10. Capaian IKU IV dari Meningkatnya Kontribusi Investasi Industri Manufaktur di Sumatra

Sasaran Program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Meningkatnya kontribusi investasi industri manufaktur di Sumatra	10%	10,5%	100%	17,35%	12,52%	72%
Nilai Capaian Meningkatnya Kontribusi Investasi Industri Manufaktur di Sumatra							72%

Tercapainya target kontribusi investasi industri manufaktur di seluruh Wilayah I, khususnya Pulau Sumatra, seiring dengan perkembangan sektor industri di tingkat nasional. Di tingkat nasional, pertumbuhan sektor industri manufaktur pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 6,20 persen, dimana sebelumnya pada tahun 2012 mencapai 6,40 persen. Penurunan pertumbuhan sektor industri manufaktur ini disebabkan beberapa faktor baik di sisi sektor industri sendiri maupun sektor-sektor ekonomi lainnya. Di sisi sektor industri, penurunan ini disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor industri baik karena faktor – faktor di tingkat global maupun di tingkat nasional. Di tingkat global disebabkan oleh menurunnya ekspor produk-produk hasil industri ke negara-negara tujuan ekspor utama seperti China, Amerika Serikat, Jepang dan Eropa sebagai akibat melemahnya perekonomian di negara-negara tersebut. Di tingkat nasional, penurunan pangsa tersebut sebagai akibat tidak optimalnya kinerja sektor industri sehingga menurunkan daya saing karena faktor-faktor seperti ketersediaan gas yang sangat terbatas untuk sektor industri, keterbatasan pasokan energi listrik, masalah infrastruktur yang menyebabkan tingginya biaya logistik, iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif seperti perijinan, pertanahan, perpajakan dan faktor birokrasi.

Tabel 11. Capaian IKU IV dari Meningkatnya Kontribusi Investasi Industri Manufaktur di Kalimantan

Sasaran Program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Meningkatnya kontribusi investasi industri manufaktur di Kalimantan	5%	5,5%	100%	4.34%	12.35%	284%
Nilai Capaian Meningkatnya Kontribusi Investasi Industri Manufaktur di Kalimantan							284%

Tabel 12. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur di Sumatra dan Kalimantan

(Dalam Persen)

No.	Wilayah	2011	2012	2013	2014*)
1	Sumatra	6,07	6,60	5,96	4,70
2	Kalimantan	-1,56	-0,91	-2,36	2,10
	Nasional	4,86	5,69	5,97	7,51

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015)

Kinerja sektor industri manufaktur dapat dikelompokkan berdasarkan nilai pertumbuhan dan LQ-nya, maka akan terbagi dalam Kwadran 1 (pertumbuhan tinggi, LQ tinggi), Kwadran 2 (pertumbuhan tinggi, LQ rendah), Kwadran 3 (pertumbuhan rendah, LQ tinggi) dan Kwadran 4 (pertumbuhan rendah, LQ rendah). Provinsi-provinsi yang perlu terus didorong adalah provinsi-provinsi yang masuk Kwadran 2 yaitu yang mempunyai pertumbuhan tinggi, walaupun LQ-nya masih rendah. Jika terus didorong, sektor industri manufaktur provinsi-provinsi ini akan menjadi sektor basis.

Tabel 12. Pengelompokan Sektor Industri Manufaktur Menurut Provinsi di Wilayah I Berdasarkan Nilai Pertumbuhan dan LQ

No.	Provinsi	Growth		LQ		KUADRAN
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	
1	Aceh	-6.53	RENDAH	0.14	RENDAH	4
2	Sumatra Utara	2.97	RENDAH	1.05	TINGGI	3
3	Sumatra Barat	5.40	TINGGI	0.53	RENDAH	2
4	Riau	5.63	TINGGI	0.80	RENDAH	2
5	Kepulauan Riau	7.91	TINGGI	2.26	TINGGI	2
6	Jambi	4.07	RENDAH	0.47	RENDAH	4
7	Sumatra Selatan	4.57	RENDAH	0.60	RENDAH	4
8	Bangka Belitung	1.32	RENDAH	0.95	RENDAH	4
9	Bengkulu	6.39	TINGGI	0.21	RENDAH	2
10	Lampung	4.51	RENDAH	5.74	TINGGI	3

11	Kalimantan Barat	4.24	RENDAH	0.83	RENDAH	4
12	Kalimantan Tengah	12.16	TINGGI	0.34	RENDAH	2
13	Kalimantan Selatan	3.59	RENDAH	0.44	RENDAH	4
14	Kalimantan Timur	0.28	RENDAH	0.23	TINGGI	3
15	Kalimantan Utara		-	-		

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015)

e) **Indikator Kinerja Utama** : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Sumatra

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 8,05 persen, sementara realisasinya adalah 4,70

Tabel 13. Capaian IKU V dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Sumatra

Sasaran Program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Sumatra	5%	5,96%	110%	8,05%	4,70	58%
Nilai Capaian Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Sumatra							58%

f) **Indikator Kinerja Utama** : Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Kalimantan.

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 7.20 persen, sementara realisasinya adalah 2.10

Tabel 14. Capaian IKU VI dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Kalimantan

Sasaran program/kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Kalimantan	1%	-2,36%	-200%	7.20%	2,10%	29%
Nilai Capaian Meningkatnya pertumbuhan sektor industri di Wilayah Kalimantan							29%

Pangsa nilai tambah sektor industri manufaktur di Kalimantan dan Sumatra kurang dari target. Ini menunjukkan pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional masih didominasi oleh Pulau Jawa. Kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor di Sumatra dan Kalimantan seperti infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan energi seperti gas dan listrik dan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sehingga menyebabkan investasi-investasi baru khususnya di sektor industri manufaktur masih lebih banyak memilih untuk berlokasi di Jawa yang infrastrukturnya lengkap. Meskipun demikian, dalam 3 tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya peranan sektor industri manufaktur di Sumatra sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kondisi yang diharapkan adalah secara perlahan-lahan kontribusi sektor industri manufaktur di Sumatra meningkat sehingga dalam jangka panjang yaitu pada tahun 2035 kontribusinya menjadi sekitar 24 persen.

Tabel 15. Kontribusi Sektor Industri Manufaktur di Jawa dan Sumatra Kalimantan

(Dalam Persen)

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014
Jawa	73.65	73.41	73.07	72.78	72.64
Sumatra	21.35	23.59	23.93	24.22	24.36

Kalimantan					
Nasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015)

Tabel 16. Kontribusi Sektor Industri Manufaktur di Wilayah I

(Dalam Persen)

Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014
Sumatra	19.65	18.75	18.77	18.71	18.76
Kalimantan	8.41	7.23	6.62	6.17	6.16

Sumber : BPS (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015)

g) Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Sumatra.

Tabel 17. Capaian IKU VII dari Meningkatnya Kontribusi Investasi Sektor Industri di Wilayah Sumatra

Sasaran Strategis	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Sumatra	10%	7%	70%	17.35%	12,52%	72%
Nilai Capaian Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Sumatra							72%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 17.35 persen, sementara realisasinya adalah 12,52 persen. Realisasi investasi dari perusahaan industri yang masuk ke kawasan industri di Sumatra, diproyeksi dengan menggunakan data

investasi sektor industri yang masuk ke Sumatra. Hal ini dilakukan mengingat data investasi, khususnya investasi yang masuk ke kawasan industri di Sumatra tidak tersedia.

Tercapainya target investasi ke sektor industri manufaktur di Sumatra lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor seperti iklim investasi yang kondusif, membaiknya perekonomian di negara-negara tujuan ekspor utama, dan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang akan menarik stimulus moneter sehingga dikhawatirkan akan menarik kemKalamantan dolar yang berada di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Secara nasional, investasi PMDN sektor industri sd QW 3 tahun 2014 mencapai Rp 114,37 triliun. Investasi PMDN sektor industri mencapai 36,6 persen dari total investasi PMDN.

Tabel 18. Perkembangan Investasi PMDN Menurut Sektor

(Dalam Miliar Rupiah)

NO.	SEKTOR	2011	2012	2013	2014*)
I	SEKTOR PRIMER	16.526,3	20.369,1	25.715,5	10,692
II	SEKTOR SEKUNDER	38.533,8	49.888,9	51.171,1	41,841
1	Industri Makanan	7.940,9	11.166,7	15.081	3,934
2	Industri Tekstil	999,2	4.450,9	2.446	887
3	Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki	13,5	76,7	80	103
4	Industri Kayu	514,9	57,0	391	75
5	Ind. Kertas dan Percetakan	9.296,3	7.561,0	6.849	3,778
6	Ind. Kimia dan Farmasi	2.711,9	5.069,5	8.886	9,026
7	Ind. Karet dan Plastik	2.295,7	2.855,0	2.905	1,924
8	Ind. Mineral Non Logam	7.440,5	10.730,7	4.625	8,015
9	Ind. Logam, Mesin & Elektronik	6.787,0	7.225,7	7.568	3,676
10	Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam	-	-	210	3
11	Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	529,1	664,4	2.069	393
12	Industri Lainnya	4,8	31,5	62	27
III	SEKTOR TERSIER	17,940,6	18.924,0	19.263,9	30,554
JUMLAH		59,175	60,187	63,182	65,876

*) Kumulatif sampai dengan Quartal III 2015

Sumber : BKPM (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015)

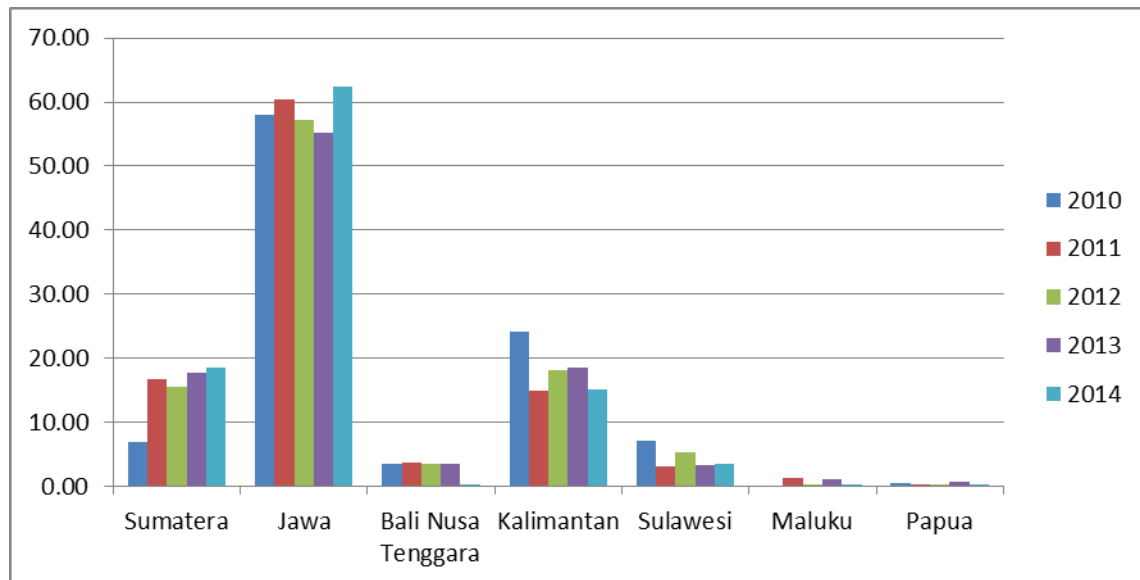
Secara nasional, investasi PMDN tahun 2015 lebih banyak terjadi di Sumatra sekitar 12,52 persen dari total investasi PMDN sebesar Rp 30,554 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatra masih menjadi tujuan baru investasi PMDN. Dalam rangka mendorong penyebaran dan pemerataan sektor industri dan ekonomi nasional, ke depan investasi ke luar Jawa harus terus didorong.

Tabel 19. Investasi PMDN Tahun 2014 Menurut Provinsi di Wilayah Sumatra dan Kalimantan

NO.	LOKASI	Nilai	
		Miliar Rp.	%
1	ACEH	1,205.90	0.76
2	SUMATRA UTARA	4,455.33	2.82
3	SUMATRA BARAT	594.15	0.38
4	RIAU	3,604.79	2.28
5	JAMBI	1,352.87	0.86
6	SUMATRA SELATAN	4,487.12	2.84
7	BENGKULU	174.19	0.11
8	LAMPUNG	1,206.63	0.76
9	BANGKA BELITUNG	570.56	0.36
10	KEPULAUAN RIAU	2,111.54	1.34
11	KALIMANTAN BARAT	5,862.91	3.72
12	KALIMANTAN TENGAH	1,244.97	0.79
13	KALIMANTAN SELATAN	2,213.36	1.40
14	KALIMANTAN TIMUR	9,276.76	5.88
15	KALIMANTAN UTARA	-	-
	JUMLAH / Total	39,254.25	24%

Sumber : BKPM (Diolah Ditjen PPI, Kemenperin, 2015)

Walaupun Sumatra menjadi tujuan baru investasi PMDN, namun secara perlahan-lahan kontribusinya menaik dalam 3 tahun terakhir ini. Pada tahun 2011, investasi PMDN di Sumatra mencapai 12 persen, naik menjadi 12,52 persen pada tahun 2013.



Gambar 5. Perkembangan Investasi PMDN Tahun 2010-2014 Menurut Wilayah

Sementara itu, untuk investasi PMA di sektor industri sampai dengan triwulan 3 tahun 2014 mencapai US \$ 21,74 miliar. Investasi PMA untuk sektor industri pada tahun mencapai 35 persen.

Secara nasional, investasi PMA tahun 2014 lebih banyak terjadi di Pulau Jawa sekitar 53,44 persen dari total investasi PMA sebesar US \$ 21,74 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama investasi PMA. Sementara itu, wilayah-wilayah lain di luar Jawa seperti Sumatera menyerap 13,41 persen dari total investasi PMA. Dalam rangka mendorong penyebaran dan pemerataan sektor industri dan ekonomi nasional, ke depan investasi ke luar Pulau Jawa harus terus didorong.

h) Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Kalimantan.

Tabel 24. Capaian IKU VIII dari Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Sumatra dan Kalimantan

Sasaran	IKU	2014	2015

Strategis		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
		Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Kalimantan	10%	10,3%	200%	14.34%
Nilai Capaian kontribusi investasi sektor industri di Wilayah Kalimantan							300%

Target yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah 4.34 persen, sementara realisasinya adalah 12,35 persen. Realisasi ekspor dari perusahaan industri yang masuk ke kawasan industri di Kalimantan, diproksi dengan menggunakan data ekspor seluruh produk dari Kalimantan. Hal ini dilakukan mengingat data ekspor, khususnya ekspor yang berasal dari perusahaan kawasan industri di Kalimantan tidak tersedia. Secara nasional total ekspor non-migas tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober mencapai US \$ 64 miliar, dimana sebagian besar (16 persen). Sementara itu, dilihat dari sisi provinsi Kalimantan Timur masih merupakan provinsi yang terbesar kontribusinya sekitar 5,88 persen, disusul oleh Kalimantan Barat (3,72 persen) dan Kalimantan Selatan (1,40 persen). Sementara itu, kontribusi provinsi-provinsi di Wilayah I lainnya dalam terhadap ekspor nasional relatif masih sangat kecil.

2. Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Sumatra dan Kalimantan

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I dalam rangka tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Sumatra dan Kalimantan diukur melalui indikator kinerja utama tersusunnya masterplan pengembangan WPPI.

Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 29. Capaian IKU dari Tumbuh dan Berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Sumatra dan Kalimantan

Sasaran Program/Kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Tersusunnya Masterplan Pengembangan WPPI	-	-	-	4 Prov.	4 Prov.	100
Nilai Capaian Tumbuh dan Berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Sumatra dan Kalimantan							100

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan tentang Perwilayahan Industri untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah NKRI. Penyebaran pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi didukung oleh struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Mengingat daya dukung pulau Sumatra yang terbatas, serta potensi peran industri sebagai motor penggerak ekonomi, maka penyebaran dan pemerataan pembangunan industri merupakan agenda penting dalam mewujudkan struktur ekonomi nasional yang kokoh dan seimbang. Sejalan dengan amanat Undang-undang di atas, Kementerian Perindustrian akan terus berupaya untuk melakukan pemerataan dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk Pulau Sumatra dimana sebagian besar aktivitas sektor industri nasional berlokasi, maka perlu dilakukan penataan agar industri di Pulau Sumatra tetap dapat berdaya saing dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang ada.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Industri melalui Per-

wilayahan Industri yang dilaksanakan melalui : pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI), dan pengembangan Sentra Industri kecil dan Industri Menengah (SIKIM).

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) merupakan wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat.

Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah I memiliki sasaran program/kegiatan berupa tumbuh dan berkembangnya Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Wilayah Sumatra dan Kalimantan, yang memiliki indikator kinerja berupa tersusunnya masterplan pengembangan WPPI di beberapa daerah, yaitu :

a. Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI di Koridor Sumatra

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut terhadap kebijakan Kementerian Perindustrian untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan industri di Indonesia. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI bertujuan agar Pemerintah memiliki pedoman dalam pengembangan wilayah pertumbuhan industri dan acuan dalam pengembangan spasial industri di daerah baik dalam bentuk KPI, KI dan Sentra IKM.

Di Sumatra, WPPI memiliki aktivitas industri cukup besar. Penyusunan masterplan pengembangan WPPI di Sumatra dilakukan di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, yaitu di Provinsi Riau dan Lampung dengan melihat konektivitas dari daerah lain.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kajian yang meliputi analisa spasial dan tata ruang, analisa kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukung pengembangan WPPI, analisa sektor industri, analisa sistem logistik, analisa kebijakan publik, analisa ekologi dan analisa perencanaan strategis dan rencana aksi untuk mendukung implementasi pengembangan WPPI.

Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) yang dilaksanakan melalui desk study, survey, pengumpulan data dan informasi terkait

WPPI, kajian kebijakan sektoral dan spasial terkait perindustrian di Provinsi Banten dan Sumatra Tengah, pemetaan dan kajian potensi sumberdaya wilayah yang terkait dengan sektor industri (sumber daya ekonomi, sumber daya sosial budaya, sumberdaya alam, sumber daya infrastruktur dan logistik, kelembagaan, pendanaan), FGD (*Focus Group Discussion*) dalam rangka mendapatkan masukan dari para *stakeholder* terkait sebagai penyusunan masterplan, dan penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan WPPI.

Adapun output yang dihasilkan adalah masterplan pengembangan WPPI Provinsi Riau dan Lampung yang berisi :

- Rencana Pengembangan WPPI di Provinsi Riau dan Lampung dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan industri (indikasi lokasi Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra IKM dan arah pengembangan industri);
- Rencana pengembangan dan penyediaan kebutuhan infrastruktur baik fisik maupun non fisik dalam pengembangan WPPI Riau dan Lampung (transportasi/logistik, sarana pendukung (air, listrik, energi, telekomunikasi) dan sumber daya manusia).
- Rencana strategis pengembangan WPPI Riau dan Lampung (kebijakan, strategi dan program dalam pengembangan WPPI)
- Rencana aksi pengembangan WPPI (kelembagaan, pentahapan, program dan pendanaan).

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen masterplan yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur.

b. Penyusunan Masterplan Pengembangan WPPI Koridor Kalimantan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun masterplan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Kalimantan Barat Pontianak-Landak-

Sanggau-Ketapang–Sambas-Bengkayang dan Provinsi Kalimantan Selatan pada WPPI Tanah Bumbu-Tanah Laut-Kotabaru. WPPI di Kalimantan Selatan (Tanah Bumbu-Tanah Laut dan Kotabaru) memfokuskan pada industri bijih besi dengan KI Batulicin (Kab Tanah Bumbu), KI Pulau Sebuku (Kab Kotabaru) dan KI Jorong (Kab Tanah Laut).

Sedangkan WPPI Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang–Sambas-Bengkayang memfokuskan pada industri alumina dan perkebunan (karet dan sawit). Industri alumina ada di Kab Ketapang yaitu di KI Desa Pagar Mentimun Kec Matan Hilir Selatan dengan champion PT Ketapang Bangun Sarana (PT KBS) yang fokus di pengolahan alumina dan KI di Kec Kendawangan dengan champion PT WHW (focus pada revenery alumina). Selain di Ketapang, fokus industri alumina juga dilakukan di KI Tayan (Kab Sanggau). KI Mandor (Kab Landak) memfokuskan pada pengolahan karet sedangkan KI Semparuk (Kab Sambas) fokus pada industri pengolahan sawit. Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) yang dilaksanakan melalui desk study, survey, pengumpulan data dan informasi terkait WPPI, pemetaan data dan informasi terkait dengan masalah ekonomi, industri, investasi, perdagangan, infrastruktur dan logistik, sumber daya serta perwilayahan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, FGD atau rapat teknis dalam rangka mendapatkan masukan dari para stakeholder terkait penyusunan rencana induk, serta penyusunan rencana induk pengembangan WPPI (masterplan, rencana strategis, rencana aksi dan rencana pengembangan infrastruktur).

Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah laporan pengembangan WPPI yang berisi :

- Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan WPPI di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan industri untuk masing-masing WPPI;
- Rencana Strategis dan Rencana Aksi Pengembangan WPPI Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat;
- Kebutuhan infrastruktur baik fisik maupun non fisik dalam pengembangan

wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di masing-masing WPPI.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen masterplan yang telah disusun kepada stakeholder di daerah dan menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur.

2. Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I dalam rangka tumbuh dan berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan diukur melalui indikator kinerja utama terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan.

Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 30. Capaian IKU dari Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan

Sasaran Program/Kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Tumbuh dan berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Terfasilitasinya kawasan industri dalam penyusunan kajian dan dokumen perencanaan pembangunan	3	3	100%	5 KI	7 KI	120
Nilai Capaian Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Industri di Wilayah Sumatra dan Kalimantan							120

Dalam pengembangan perwilayahan industri sebagaimana pada pasal 14 dari Undang-undang No. 3 Tahun 2014 disebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah I melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan industri di beberapa daerah, yaitu :

a. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Industri di Sumatra (Sei Mangkei, Kuala Tanjung, dan Tanggamus)

Sesuai dengan amanat undang-undang, setiap perusahaan industri baru wajib masuk ke dalam kawasan industri dengan pertimbangan agar industri yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, ramah lingkungan, pengelolaan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur pendukung. Adapun dampak yang diharapkan dalam pembangunan kawasan industri antara lain memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kavling industri siap bangun yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, memberikan kepastian hukum lokasi tempat usaha sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha, dan mengatasi permasalahan tata ruang sekaligus mengendalikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri. Implementasi kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sub kegiatan :

1. Penyusunan dokumen DED dan RDTR Kuala Tanjung dan Tanggamus
 2. Penyusunan DED di Sei Mangkei dan Pembangunan Fisik Berupa Dry Port, Jalan Poros, Tanki Timbun, dan Jalan Kereta Api
- (1). Penyusunan Dokumen DED dan RDTR di Kuala Tanjung dan Tanggamus dimaksudkan agar kawasan industri serta lingkungannya tertata dengan baik dengan kelengkapan sarana dan prasarana dan memperhatikan dampak lingkungan. Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) melalui desk study, survey, penyusunan desain fisik, kajian wilayah dan topografi serta struktur ruang, kajian industri yang

akan menjadi penggerak kawasan industri, FGD dengan stakeholder terkait, konsultasi publik, penyusunan album gambar (bestek) yang memuat gambar rancangan, detail rancangan dan gambar konstruksi, penyusunan dokumen rencana anggaran biaya (termasuk analisa kelayakan finansial) dan analisa rinci spesifikasi teknis, kelembagaan serta menyusun siteplan.

Pihak ketiga bertugas membuat suatu dokumen perencanaan teknis yang lengkap sehingga ada satu dokumen kegiatan Perencanaan Teknis (DED) pembangunan kawasan industri Tanggamus dan dan Kuala Tanjung, dimana penyusunan dokumen ini bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan fisik di lapangan sehingga diperoleh efisiensi dan efektifitas dan bangunan yang handal.

Pembangunan kawasan industri diawali dengan Pra FS, penyusunan Masterplan, hingga pada tahap pembangunan dengan mengacu pada rencana detail kawasan yang dituangkan dalam rencana Detailed Engineering Design. Detail Engineering Design (DED), merupakan tahap pengembangan perencanaan, dilakukan penyempurnaan analisa elemen struktur sehingga diperoleh suatu konfigurasi struktur yang baik dari segi kekuatan, kestabilan, keamanan dan ekonomis. Dengan demikian dapat diperoleh suatu desain struktur bangunan yang optimal.

Sasaran dalam penyusunan DED kawasan industri Kuala Tanjung dan Tanggamus yang diinginkan dalam kegiatan ini antara lain:

- a. Penyusunan Desain Fisik Rancangan Desain Tata Letak dan Petunjuk Desain Fisik, Gambar Rancangan, Detail Rancangan dan Gambar Konstruksi
 - b. Menyusun dokumen Rencana Anggaran Biaya dan Analisa Rinci Spesifikasi Teknis
 - c. Menyusun dokumen Rencana Kerja dan Syarat
3. (2). Penyusunan DED di Sei Mangkei dan Pembangunan Fisik Berupa Dry Port, Jalan Poros, Tanki Timbun, dan Jalan Kereta Api bertujuan untuk membantu pengembangan industri di Kabupaten Simalungun melalui rencana pembangunan kawasan industri. Provinsi Sumatra Utara

merupakan provinsi yang memiliki daerah yang sangat potensial dijadikan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya Kabupaten Majalengka. Dengan adanya mega proyek Bandara Internasional Kuala Namu di, tentunya akan menjadikan Majalengka sebagai pusat pertumbuhan baru di pesisir Timur Sumatra.

Salah satu syarat dalam pembangunan kawasan prioritas Sei Mangkei di amanatkan dalam Nawacita adalah membangun fisik. Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga yang bertugas membangun fisik.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri tersebut kepada stakeholder yang terkait.

b. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri di Kalimantan (Jorong, Ketapang, dan Landak)

Kawasan industri di Indonesia berkembang sekitar awal tahun 1970an yang merupakan inisiasi dari pemerintah pusat. Di tahun 1990an, pemerintah membuka pintu investasi di kawasan industri untuk sector swasta dan sejak saat itu kawasan industri bermunculan satu persatu dan tumbuh dengan pesat. Saat krisis ekonomi akhir 1990an, banyak kawasan industri yang mati suri, kawasan industri tersebut mulai hidup lagi di pertengahan tahun 2000an seiring dengan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi.

Dengan pesatnya pertumbuhan kawasan industri saat ini, beragam permasalahan pun muncul. Kawasan industri menghadapi banyak permasalahan dalam operasionalnya seperti terkait lahan, tata ruang, kebijakan, lingkungan, infrastruktur, social budaya dan sebagainya. Direktorat Fasilitasi Industri Wilayah I bermaksud untuk menata kawasan-kawasan industri sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan menyusun strategi dalam upaya penataan dan pengembangan kawasan industri di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Implementasi kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sub kegiatan :

- (1) Penyusunan kajian DED kawasan industri di Landak, Jorong, dan Ketapang
- (2) Penyusunan kajian penataan RDTR di sekitar kawasan industri Jorong, Landak, dan Ketapang

Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Penyusunan kajian DED kawasan industri di Landak, Jorong, dan Ketapang bertujuan untuk menyusun rencana penataan dan pengembangan kawasan industri di Kalimantan yang meliputi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga melalui koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis dengan output yang diharapkan berupa dokumen program dan bentuk penataan KI di Landak, Jorong, dan Ketapang, dokumen program dan bentuk kajian DED KI koridor Kalimantan dan dokumen program dan bentuk penataan RDTR di sekitar KI di masing-masing kabupaten/kota wilayah studi yang di dalamnya mencakup analisa karakteristik industri eksisting, analisa kesesuaian kawasan industri/zona industri eksisting, analisa kinerja infrastruktur pendukung kawasan industri, review tata ruang wilayah dan peraturan terkait pengembangan kawasan industri, identifikasi dan analisa permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama pengembangan kawasan industri, analisa kondisi kawasan industri, tantangan dan hambatan pengembangan kawasan industri di masa akan datang, analisa kelayakan pengembangan kawasan industri, penyusunan peta rencana penataan dan pengembangan kawasan industri, rencana kebutuhan infratsruktur pendukung kawasan industri serta penyusunan strategi penataan kawasan industri di wilayah studi.
- (2) Penyusunan kajian RDTR di sekitar kawsan industri Jorong, Landak, dan Ketapang bertujuan untuk menyusun rencana penataan dan pengembangan kawasan industri di Kalimantan. Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga yang melakukan identifikasi dan analisis karakteristik kawasan industri eksisting di wilayah studi, identifikasi dan analisis kesesuaian wilayah studi dengan pedoman pengembangan kawasan industri, identifikasi dan analisis kinerja infrastruktur pendukung kawasan industri, review rencana tata ruang wilayah dan peraturan terkait pengembangan kawasan industri, identifikasi

dan analisis permasalahan, tantangan dan hambatan pengembangan kawasan industri, analisis kelayakan pengembangan kawasan industri, penyusunan peta rencana penataan dan pengembangan kawasan industri, penyusunan rencana kebutuhan infrastruktur pendukung kawasan industri dan penyusunan strategi penataan kawasan industri di wilayah studi.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri yang telah disusun tersebut kepada stakeholder di daerah untuk dijadikan rekomendasi penataan dan pengembangan kawasan industri.

3. Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKM) di Wilayah Sumatra dan Kalimantan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan pembangunan Sentra IKM di daerah. Hasil yang diharapkan adalah teridentifikasinya permasalahan terkait pembangunan Sentra IKM di daerah seperti kondisi lahan untuk pembangunan Sentra IKM, jenis industri yang menjadi andalan di Sentra IKM tersebut dan komitmen daerah untuk pembangunan Sentra IKM. Koordinasi telah dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Padang dan Kabupaten Belitung

:

Tabel 30. Capaian IKU dari Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah di Wilayah Sumatra dan Kalimantan

Sasaran Program/Kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKM) di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Terfasilitasinya sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan	-	-	-	2 SIKIM	2 SKIM	100

Nilai Capaian Tumbuhnya Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SKIM) di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Dalam pengembangan perwilayahan industri sebagaimana pada pasal 14 dari Undang-undang No. 3 Tahun 2014 disebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Peran industri kecil dan menengah dalam pembangunan industri nasional sangat besar dan penyebarannya hampir merata disemua daerah, namun sebagian besar kegiatan industrinya belum tersentralisasi di satu lokasi. Hal ini antara lain berdampak kepada timbulnya masalah lingkungan dan terbatasnya dukungan infrastruktur. Sehingga Pada tahun 2015, Direktorat PFI Wilayah 2 akan memfasilitasi Perencanaan Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Padang dan Kabupaten Belitung yang diharapkan dapat menjadi sentra yang bermanfaat dan berdaya saing.

Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah I melakukan fasilitasi sentra IKM dalam penyusunan rencana pembangunan di beberapa daerah, yaitu :

Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Padang dan Kabupaten Belitung

a. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2014 untuk melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai

tambah serta menyerap tenaga kerja. Pengembangan sentra IKM diarahkan pada kabupaten/kota yang telah memiliki Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sub kegiatan, yaitu :

- (1). Kajian pola pengembangan sentra IKM di Kalimantan Barat
- (2) Kajian pola pengembangan sentra IKM di Belitung
- (3) Kajian pola pengembangan sentra IKM di Padang

Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

- (1). Kajian pola pengembangan sentra IKM di Kalimantan Barat bertujuan untuk menyusun pola pengembangan sentra industri Kabupaten/Kota wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi Kabupaten Seruyan dan Kota Pontianak. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga dengan melakukan koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data dan FGD di daerah untuk menghimpun data serta masukan dari *stakeholder* terkait. Adapun output yang dihasilkan adalah dokumen kajian pola pengembangan sentra industri kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang mencakup didalamnya analisis konsep dan rencana pengembangan sentra IKM, review dan analisis kinerja Sentra IKM eksisting, identifikasi dan analisis permasalahan pengembangan Sentra IKM, identifikasi dan analisis potensi pengembangan Sentra IKM, identifikasi dan analisis kebutuhan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung sentra IKM, identifikasi dan analisis kelembagaan sentra IKM, serta rencana penguatan kelembagaan sentra IKM di wilayah studi.
- (2). Kajian pola pengembangan sentra IKM di Kota Padang bertujuan untuk menyusun pola pengembangan sentra industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat Kegiatan ini dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga dengan melakukan koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data dan FGD di daerah untuk menghimpun data serta masukan dari *stakeholder* terkait. Adapun output yang dihasilkan adalah dokumen masterplan pengembangan sentra IKM di Padang Pariaman yang mencakup di dalamnya analisa kesesuaian lokasi peruntukan sentra IKM, kajian wilayah dan topografi, analisa struktur ruang, kajian industri yang akan menjadi penggerak

sentra IKM, konsep pengembangan sentra IKM, perencanaan zoning dan besaran perbandingan lahan, rencana pengembangan infrastruktur atau sarana/prasarana pendukung sentra IKM, site plan lokasi peruntukan sentra IKM di wilayah studi, analisa kelayakan finansial, ekonomi, sosial dan lingkungan, serta analisa bussines plan perencanaan pembangunan sentra IKM di wilayah studi.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan adalah menyampaikan dokumen kajian pola pengembangan sentra IKM di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat kepada stakeholder di daerah untuk dijadikan bahan rekomendasi pengembangan Sentra IKM di wilayah tersebut. Sementara itu, rencana tindak lanjut untuk penyusunan masterplan pengembangan Sentra IKM di Provinsi Sumatra Barat adalah perencanaan konstruksi (DED) Sentra IKM di Kabupaten di Kalimantan Barat.

b. Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Kabupaten Belitung

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.3 Tahun 2014 untuk melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri, maka untuk mendukung hal tersebut, Direktorat PFI Wilayah I melakukan penyusunan masterplan pengembangan sentra IKM di Sumatra Barat. Melalui penyusunan Masterplan Sentra IKM ini, Kementerian Perindustrian bermaksud mendapatkan model pengembangan Sentra IKM yang khas di Belitung khususnya di Kab. Bangka dan Kab. Belitung serta dapat menjadi model rujukan pengembangan Sentra IKM di daerah se-Belitung dan daerah lainnya di Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun model pola pengembangan sentra industri kecil dan menengah di Bangka melalui penyusunan masterplan sentra IKM di Bangka Tengah. Implementasi kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) melalui rapat koordinasi, survey, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen masterplan pengembangan sentra IKM di Kabupaten Bangka Tengah yang di

dalamnya mencakup analisa kesesuaian lokasi peruntukan sentra IKM, kajian wilayah dan topografi, analisa struktur ruang, kajian industri yang akan menjadi penggerak sentra IKM, konsep pengembangan sentra IKM di Kabupaten Bangka Tengah, perencanaan zoning dan besaran perbandingan lahan, penyusunan rencana pengembangan infrastruktur atau sarana/prasarana, penyusunan site plan, analisa kondisi lingkungan wilayah studi, analisa kelayakan finansial, penyusunan bussines plan dan analisa kelembagaan (pengelola sentra IKM).

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan dokumen pola pengembangan sentra IKM yang telah disusun kepada stakeholder di daerah serta melanjutkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sentra IKM yang direncanakan melalui mekanisme DAK.

c. Fasilitas Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kecil/Sentra di Sumatra dan Kalimantan (Seruyan, Tarakan, Murung Raya)

Sasaran yang diinginkan dalam kegiatan ini adalah Penyusunan Desain Fisik Rancangan, Desain Tata Letak dan Petunjuk Desain Fisik, Gambar Rancangan, Detail Rancangan dan Gambar Konstruksi untuk Sentra IKM. DED Gedung Sentra IKM meliputi : gedung produksi, gedung pengelola, showroom dan gudang. Sedangkan sarana prasarana Sentra IKM meliputi : jalan, drainase, IPAL dan pagar.

4. Berkembangnya Industri di Daerah melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatra dan Kalimantan

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I dalam rangka berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sumatra dan Kalimantan diukur melalui indikator kinerja utama terfasilitasinya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah

ini :

Tabel 31. Capaian IKU dari Berkembangnya Industri di Daerah melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatra dan Kalimantan

Sasaran Program/Kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Berkembangnya industri di daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatra dan Kalimantan	Terfasilitasinya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	12 daerah	12 daerah	100
Nilai Capaian Berkembangnya Industri di Daerah melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatra dan Kalimantan							100

Sebagai pengungkit dan pendorong pembangunan ekonomi, sektor industri Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sejak tahun 2004, terjadi perubahan internal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa konsekuensi meningkatnya peran dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perumusan Kebijakan Sektor Industri. Apabila dilihat secara makro, hal ini seringkali membawa ketidak efektifan dalam penyelenggaraan kegiatan industri secara nasional. Banyaknya pemegang kewenangan sektoral dan regional sering kali memberi dampak tidak efisiennya pemanfaatan sumber daya sektor industri

karena semua pihak berupaya untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingannya masing-masing.

Untuk itu, diperlukan suatu Peran Pemerintah pusat dalam mensinergikan kebijakan pembangunan industri di daerah (Provinsi dan Kabupaten). Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah I melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota di beberapa daerah, yaitu :

a. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi di Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kaltara

Sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Bab III pada Pasal 10 dan Pasal 11 yang menyatakan bahwa setiap Kepala Daerah menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, serta keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di daerah, sehingga Direktorat PFI Wilayah I melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi di Kalbar, Kalteng, Kaltim, dan Kaltara

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis bagi provinsi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi, yang bertujuan agar terjadi keselarasan Rencana Pengembangan Industri Provinsi dengan Rencana Pengembangan Industri Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk swakelola dengan melibatkan narasumber yang kompeten melalui koordinasi, FGD/rapat teknis untuk menghimpun data dan informasi yang nantinya akan diolah oleh tenaga ahli yang berkompeten serta dilakukan bimbingan teknis penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi kepada Tim penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi yang telah dibentuk yang terdiri dari berbagai unsur SKPD terkait di masing-masing provinsi. Output dari kegiatan ini yang diharapkan adalah draft penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi berbasis keunggulan lokal yang telah disusun oleh Tenaga Ahli dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi Tim di daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi di wilayah mereka. Secara

umum kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan mencapai output yang ditetapkan.

b. Fasilitas Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, dan Aceh

Direktorat PFI Wilayah I melakukan fasilitas penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi di **Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, dan Aceh**

. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis bagi provinsi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi, yang bertujuan agar terjadi keselarasan Rencana Pengembangan Industri Provinsi dengan Rencana Pengembangan Industri Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk swakelola dengan melibatkan narasumber yang kompeten melalui koordinasi, FGD/rapat teknis untuk menghimpun data dan informasi yang nantinya akan diolah oleh tenaga ahli yang berkompeten serta dilakukan bimbingan teknis penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi kepada Tim penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi yang telah dibentuk yang terdiri dari berbagai unsur SKPD terkait di masing-masing provinsi. Output dari kegiatan ini yang diharapkan adalah draft penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi berbasis keunggulan lokal yang telah disusun oleh Tenaga Ahli dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi Tim di daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi di wilayah mereka. Secara umum kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan mencapai output yang ditetapkan.

c. Fasilitas Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten di Kabupaten OKU Sumsel, Kabupaten Penajam Paser Utara di Kaltim, Kabupaten, Banjar Baru di Kalsel, Kabupaten Solok Selatan di Sumbar, dan Kabupaten Darmasraya di Sumbar

Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I melaksanakan kegiatan Fasilitas Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten di Kabupaten OKU Sumsel, Kabupaten Penajam Paser Utara di Kaltim,

Kabupaten, Banjar Baru di Kalsel, Kabupaten Solok Selatan di Sumbar, dan Kabupaten Darmasraya di Sumbar sebagai upaya untuk memberikan arah pengembangan industri di daerah sehingga selaras dengan Kebijakan Industri Nasional. Daerah yang difasilitasi adalah daerah yang termasuk ke dalam daerah tertinggal atau daerah dengan kondisi pertumbuhan industri yang belum besar. Rancangan yang disusun dari kegiatan ini akan dijadikan sebagai materi teknis untuk bahan draft lampiran Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sub kegiatan, yaitu :

- (1). Penyusunan Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota Kabupaten OKU Sumsel, Kabupaten Penajem Paser Utara di Kaltim, Kabupaten, Banjar Baru di Kalsel, Kabupaten Solok Selatan di Sumbar, dan Kabupaten Darmasraya di Sumbar
- (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Kabupaten OKU Sumsel, Kabupaten Penajem Paser Utara di Kaltim, Kabupaten, Banjar Baru di Kalsel, Kabupaten Solok Selatan di Sumbar, dan Kabupaten Darmasraya di Sumbar

Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

- (1). Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Kabupaten OKU Sumsel, Kabupaten Penajem Paser Utara di Kaltim, Kabupaten, Banjar Baru di Kalsel, Kabupaten Solok Selatan di Sumbar, dan Kabupaten Darmasraya di Sumbar bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam draft Peraturan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten OKU Sumsel, Kabupaten Penajem Paser Utara di Kaltim, Kabupaten, Banjar Baru di Kalsel, Kabupaten Solok Selatan di Sumbar, dan Kabupaten Darmasraya di Sumbar. Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) dengan melakukan survey, pengumpulan data dan informasi serta melakukan analisis, dimana output yang diharapkan dari kegiatan ini merupakan Rancangan Bahan Masukan Draft Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, yang di dalamnya mencakup kajian terhadap kebijakan dan peraturan yang ada serta studi terdahulu sebagai dasar program pembangunan industri; identifikasi potensi pembangunan industri dari sisi keunggulan SDA, industri prioritas dan kompetensi SDM; identifikasi rencana pengembangan industri dan sarana prasarana pendukung industri seperti infrastruktur; review kajian kompetensi

inti industri Kabupaten/Kota; analisa potensi dan daya saing daerah; analisa rantai nilai; analisa terhadap industri prioritas; analisa isu-isu strategis; penyusunan konsep pembangunan industri prioritas; serta penyusunan materi taeknis draft lampiran Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

- (2). Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten OKU Sumsel, Kabupaten Penajem Paser Utara di Kaltim, Kabupaten, Banjar Baru di Kalsel, Kabupaten Solok Selatan di Sumbar, dan Kabupaten Darmasraya di Sumbar bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang akan disajikan sebagai bahan masukan dalam draft Peraturan Daerah. Kegiatan ini dilakukan di 4 Kabupaten yaitu Kabupaten OKU Sumsel, Kabupaten Penajem Paser Utara di Kaltim, Kabupaten, Banjar Baru di Kalsel, Kabupaten Solok Selatan di Sumbar, dan Kabupaten Darmasraya di Sumbar . Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga (jasa konsultan) dengan melakukan survey, pengumpulan data dan informasi serta melakukan analisis, dimana output yang diharapkan dari kegiatan ini merupakan Rancangan Bahan Masukan Draft Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, yang di dalamnya mencakup kajian terhadap kebijakan dan peraturan yang ada serta studi terdahulu sebagai dasar program pembangunan industri; identifikasi potensi pembangunan industri dari sisi keunggulan SDA, industri prioritas dan kompetensi SDM; identifikasi rencana pengembangan industri dan sarana prasarana pendukung industri seperti infrastruktur; review kajian kompetensi inti industri Kabupaten/Kota; analisa potensi dan daya saing daerah; analisa rantai nilai; analisa terhadap industri prioritas; analisa isu-isu strategis; penyusunan konsep pembangunan industri prioritas; serta penyusunan materi teknis draft lampiran Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan adalah menyampaikan rencana pembangunan industri kabupaten/kota yang telah disusun oleh tenaga ahli kepada pemerintah daerah

sebagai materi teknis untuk bahan draft lampiran Peraturan Daerah.

5. Berkembangnya Industri di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik di Wilayah Sumatra dan Kalimantan

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I dalam rangka berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Sumatra dan Kalimantan diukur melalui indikator kinerja utama terfasilitasinya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik. Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 32. Capaian IKU dari Berkembangnya Industri Daerah Tertinggal, terdepan, Terluar dan Pasca Konflik di Wilayah Sumatra dan Kalimantan

Sasaran Program/Kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Berkembangnya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di wilayah Sumatra dan Kalimantan	Terfasilitasinya industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik	-	-	-	8 daerah	8 daerah	100
Nilai Capaian Berkembangnya Industri di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik di Wilayah Sumatra dan Kalimantan							100

Dalam rangka membangun daya saing industri secara berkelanjutan, maka pengembangan industri daerah yang berlandaskan potensi dan keunggulan daerah terutama di daerah tertinggal perlu diprioritaskan, sehingga sasaran pembangunan industri daerah yang salah satunya adalah untuk meningkatkan nilai tambah komoditi unggulan daerah dapat terealisasi dan dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut sehingga mengurangi kesenjangan antara Kabupaten/Kota. Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah I melakukan fasilitas industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik di beberapa daerah, yaitu :

a. Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tertinggal di Kabupaten Aceh Langsa, Aceh Timur,

Kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi dengan instansi/stakeholder terkait di pusat dan daerah dalam pengembangan industri unggulan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Langsa dan Aceh Timur serta melakukan fasilitasi pengembangan industri unggulan daerah tertinggal. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dan menggunakan pihak ketiga, melalui rapat, koordinasi dengan daerah, diskusi, survey lapangan, pelatihan pengembangan industri unggulan, pendampingan dan pemberian bantuan mesin peralatan. Implementasi kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sub kegiatan :

- (1). Peningkatan Kemampuan SDM di Aceh Langsa dan Aceh Timur
- (2). Peningkatan Kemampuan SDM di Pakpak Bharat
- (3). Fasilitasi Bantuan Mesin/Peralatan

Deskripsi masing-masing sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

- (1).Peningkatan Kemampuan SDM di Aceh Langsa dan Aceh Timur bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM di bidang produksi kopi dengan tujuan agar pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk yang memiliki daya saing. Kegiatan ini dilakukan melalui pembelajaran (teori) dan praktek di kelas terhadap 20 peserta yang berasal dari industri logam selama 5 hari (40 JPL) dengan instruktur yang kompeten di bidangnya. Adapun output yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas SDM di bidang industri logam di Kabupaten Aceh Langsa dan Aceh Timur i.
- (2).Peningkatan kemampuan SDM di Pakpak Bharat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM di budang produksi gambir dengan tujuan agar pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk yang memiliki daya saing. Kegiatan ini dilakukan melalui pembelajaran (teori) dan praktek di kelas kepada 20 peserta yang berasal dari industri gula aren di Kabupaten Lebak selama 5 hari (40 JPL). Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM di bidang industri gula aren di Kabupaten pakpak Barat.

(3). Fasilitasi bantuan mesin/peralatan yang diberikan yaitu mesin peralatan industri pengolahan logam untuk KUB di Kabupaten Aceh Langsa dan Aceh Timur serta mesin peralatan industri pengolahan gambir untuk KUB di Kabupaten Pakpak Bharat. Pelaksana kegiatan ini adalah pihak ketiga yang ditentukan melalui lelang di ULP.

Secara umum pelaksanaan seluruh kegiatan fasilitasi pengembangan industri unggulan daerah tertinggal di Kabupaten Aceh Langsa dan Aceh Timur berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah monitoring dan evaluasi fasilitasi bantuan alat yang telah diserahkan ke KUB.

6. Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri di Daerah Wilayah I

Sesuai dengan Penetapan Kinerja, sasaran program/kegiatan yang akan dicapai Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I dalam rangka forum kegiatan/koordinasi/monev/pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah Wilayah I diukur melalui indikator kinerja utama tersusunnya program pengembangan industri daerah Wilayah I dan terlayannya operasional perkantoran. Adapun realisasi, target serta capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 33. Capaian IKU dari Forum Kegiatan/Koordinasi/Monev/Pembinaan Pengembangan Fasilitasi Industri di Daerah Wilayah I

Sasaran Program/Kegiatan	IKU	2014			2015		
		T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Forum kegiatan/koordinasi/monev/pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah Wilayah I	Tersusunnya program pengembangan industri daerah Wilayah I	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100
	Terlayannya operasional perkantoran	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100
	Terlaksananya penerapan budaya kerja	-	-	-	1 satker	1 satker	100

	5K						
Nilai Capaian Forum kegiatan/koordinasi/ monev/pembinaan pengembangan fasilitasi industri di daerah Wilayah I							100

Tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I adalah melakukan penyiapan perumusan kebijakan industri, penyiapan norma, standart, prosedur dan kriteria industri, penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi teknis industri dan pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja. Untuk mencapai tugas dan fungsi tersebut perlu di dukung oleh kegiatan penyusunan program , rencana kerja dan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung hal tersebut, antara lain :

a. Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah I

Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan program pembinaan pengembangan perwilayahan industri dengan kondisi potensi dan kebutuhan daerah serta dengan instansi atau stakeholder terkait agar efektif dan efesien. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola melalui koordinasi dan konsinyering penyusunan program, renkin, Tapkin dan Lakip serta rapat koordinasi dengan daerah-daerah sasaran pembinaan dan pengembangan industri wilayah Sumatra dan Kalimantan. Adapun output dari kegiatan ini adalah dokumen penyusunan program pengembangan industri Wilayah I (4 dokumen) yaitu dokumen RAB dan TOR, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kegiatan ini secara umum berjalan lancar dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mengordinasikan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016.

b. Layanan Manajemen Kinerja

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan dukungan penyelenggaraan administrasi operasional dan pemeliharaan sarana perkantoran agar peralatan perkantoran serta lingkungan kerja dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-

hari sehingga tercapai hasil kerja yang optimal, efektif dan efisien. Adapun target volume yang akan dicapai adalah 12 bulan layanan. Kegiatan ini dilakukan secara swakelola yang menyangkut penyelenggaraan administrasi operasional, pemeliharaan lingkungan kerja/5K dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari serta partisipasi pada rapat/pertemuan lintas sektoral dan internal Kementerian Perindustrian.

Pada tahun 2015, Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I telah mendapatkan grading hijau dalam penilaian budaya kerja 5K Kementerian Perindustrian. Hal ini meningkat dibanding tahun 2014 yang masih mendapatkan grading kuning. Kendala yang dihadapi dalam implementasi budaya kerja 5K adalah masih kurangnya kesadaran pribadi dari masing-masing pegawai/karyawan di lingkungan Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I untuk menerapkan budaya kerja 5K dalam kehidupan sehari-hari serit kurangnya koordinasi dari Tim 5K yang telah dibentuk. Untuk itu perlu upaya perbaikan sistem berkelanjutan untuk menangani hal tersebut.

Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan pencapaian nilai yang lebih tinggi pada kegiatan 5K di tahun yang akan datang.

Anggaran DIPA yang diterima oleh Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I untuk tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 366.818.000.000,-. Dari total dana tersebut telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 345.542.556.000 (94.2%).

Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan, rata-rata nilai capaian kinerja adalah sebesar 120 %. Nilai capaian tersebut telah menunjukkan bahwa program kerja Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan capaian IKU yang ditargetkan.

Untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung sasaran yang telah ditetapkan dan pelayanan bagi *stakeholder* terkait, perlu kiranya dilakukan perbaikan terutama melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I. Dengan adanya Permenperin No 107 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka tahun ini merupakan tahun terakhir bagi nomenklatur Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I. Mulai Januari 2016, direktorat ini akan berganti menjadi Direktorat

Pengembangan Wilayah Industri II. Diharapkan proses reorganisasi dapat dilakukan sesingkat mungkin, dan menghasilkan pegawai yang lebih mumpuni dengan kemampuan untuk bekerja keras lebih baik.

Realisasi DIPA sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan program kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 34
Pagu Anggaran Direktorat PFI Wilayah I Tahun 2015

No.	Kode Output	Nama	Pagu (Rp.)
1.	1851.001	<u>Koordinasi Penyusunan Program Pengembangan Industri Daerah Wilayah I (Sinergi, Koordinasi, dan Pertemuan Teknis RKAKL)</u>	458.840.000.000
2.	1851.001	<u>Layanan Manajemen Kinerja</u>	412.620.000
3.	1851.001	<u>Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah I</u>	340.550.000
4.	1851.002	<u>Penyusunan Pola Pengembangan WPPI di Koridor Sumatera</u>	1.461.420.000
5.	1851.002	<u>Penyusunan Pola Pengembangan WPPI di Koridor Kalimantan</u>	1.157.420.000
6.	1851.003	<u>Operasional Pusat Inovasi KEK Sei Mangkei Dalam Rangka Pengembangan Inovasi Industri Berbasis Kelapa Sawit dan Turunannya</u>	2.420.240.000
7.	1851.003	<u>Penyiapan Pengembangan Kawasan Industri di Sumatera (Batubara dan Tanggamus)</u>	1.062.454.000
8.	1851.003	<u>Penyiapan Pengembangan Kawasan Industri di Kalimantan (Ketapang dan Landak)</u>	1.227.904.000
9.	1851.003	<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pusat Inovasi Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Sumatera Utara</u>	1.979.248.000
10.	1851.003	<u>Sekretariat Tim Nasional Kawasan Industri</u>	1.091.902.000
11.	1851.003	<u>Penyusunan Pola Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Industri</u>	678.022.000
12.	1851.003	<u>Pembangunan Kawasan Industri Batu Licin</u>	4.312.395.000
13.	1851.003	<u>Pembangunan Kawasan Industri Ketapang</u>	4.309.603.000
14.	1851.003	<u>Pembangunan Kawasan Industri Mandor</u>	4.304.192.000
15.	1851.003	<u>Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung</u>	4.316.812.000

16.	1851.003	<u>Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Industri Sei Mangkei</u>	311.491.725.000
17.	1851.003	<u>Pembangunan Kawasan Industri Tanggamus</u>	4.289.139.000
18.	1851.003	<u>Pembangunan Kawasan Industri Jorong</u>	4.304.684.000
19.	1851.003	<u>Koordinasi Percepatan dan Pengembangan Kawasan Industri Prioritas di Sumatera dan Kalimantan</u>	432.591.000
20.	1851.005	<u>Penyusunan Pola Pengembangan Sentra Industri Kab/Kota Di Sumatera dan Kalimantan (Kab. Bangka Tengah dan Kota Tarakan)</u>	901.658.000
21.	1851.005	<u>Penyiapan Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah di Sumatera dan Kalimantan (Kab OKU, Kab. Seruyan, Kota Pontianak)</u>	1.713.843.000
22.	1851.005	<u>Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di Sumatera dan Kalimantan (Kab. Ogan Komering Ulu dan Kota Pontianak)</u>	1.030.317.000
23.	1851.005	<u>Koordinasi Percepatan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Koridor Sumatera dan Kalimantan</u>	499.492.000
24.	1851.005	<u>Perencanaan Konstruksi Pembangunan Sentra IKM di Sumatera dan Kalimantan (Kab. Seruyan, Kota Tarakan, dan Kab. Murung Raya)</u>	2.119.050.000
25.	1851.006	<u>Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kab/Kota di Wilayah Sumatera dan Kalimantan</u>	4.062.840.000
26.	1851.006	<u>Identifikasi Potensi Pengembangan Perwilayahan Industri di Sumatera dan Kalimantan (Sumut, Kepulauan Riau, Sumsel, Lampung, Kaltim, Kalsel, Kaltara)</u>	2.849.546.000
27.	1851.007	<u>Fasilitasi Pengembangan Industri di Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pasca Konflik di Sumatera (Sumatera Utara, Provinsi Aceh)</u>	2.224.453.000
28.	1851.007	<u>Fasilitasi Pengembangan Industri di Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pasca Konflik Di Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah)</u>	1.365.040.000
		Total pagu	366.818.000.000

BAB IV**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I secara garis besar telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I tahun 2015. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I Tahun 2015. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Realisasi penyerapan DIPA tahun anggaran 2015 Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I untuk tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 366.818.000.000,-. Dari total dana tersebut telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 345.542.556.000 (94.2%).
3. Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I Perwilayahan Industri memberikan hasil rata-rata sebesar **120%** Persentase nilai tersebut dapat lebih besar dari realisasi keuangan dikarenakan ada beberapa kegiatan yang juga mendukung sasaran strategis sumber pembiayaannya tidak berasal dari Anggaran Direktorat PFI Wilayah I. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I sudah baik dan cukup efisien karena outputnya tercapai sesuai dengan target;

B. Saran

1. Guna meningkatkan pencapaian kinerja yang berkelanjutan diperlukan koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak secara lebih intensif di masa yang akan datang, terutama sejak perencanaan untuk pemantapan program sampai dengan pelaksanaannya;
2. Diperlukan peningkatan disiplin dan tata kerja dari seluruh staf pelaksana Dit. PFI Wilayah I secara lebih profesional.

LAMPIRAN